

**PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP SESUAI DENGAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) PADA
BALAI DIKLAT KEUANGAN MEDAN**

SKRIPSI

Oleh :

**MUHAMMAD HAFIZH RIDHA
NPM : 11 833 0144**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 3**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/1/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)31/1/24

**PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP SESUAI DENGAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) PADA
BALAI DIKLAT KEUANGAN MEDAN**

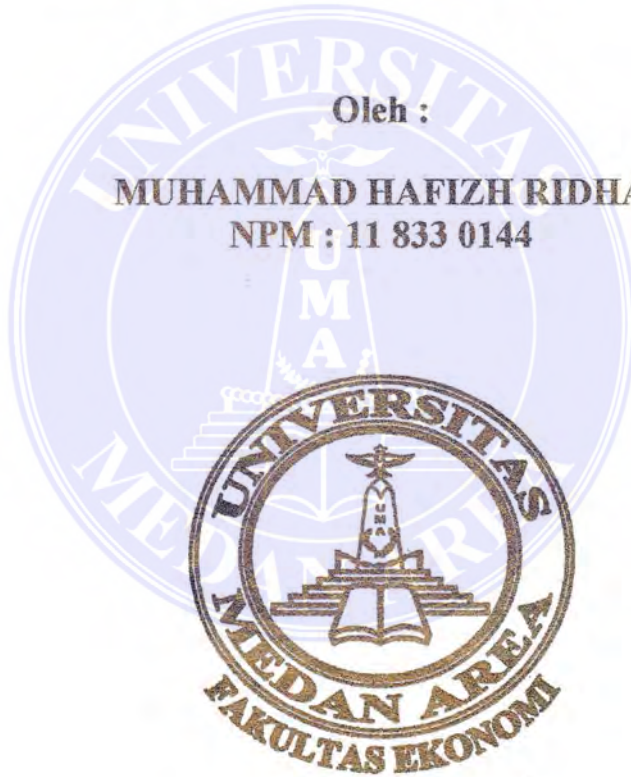
SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh :

MUHAMMAD HAFIZH RIDHA

NPM : 11 833 0144



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2013**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/1/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)31/1/24

Judul Skripsi : Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pada Balai Diklat Keuangan Medan

Medan Nama Mahasiswa : MUHAMMAD HAFIZH RIDHA

No. Stambuk : 11 833 0144

Jurusan : Akuntansi

Menyetujui :
Komisi Pembimbing

Pembimbing I



(Drs. Rasdianto, MS.,Ak)

Pembimbing II



(Dra. Hj. Rosmaini, Ak.,MMA)

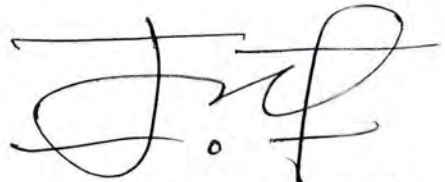
Mengetahui :

Ketua Jurusan



(Linda Lores, SE.,M.Si)

Dekan



(Prof. Dr. Sya'ad Afifuddin, SE.,M.Ec)

Tanggal Lulus : November 2013

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/1/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)31/1/24

ABSTRAK

Pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel melalui penyusunan laporan keuangan yang baik serta taat peraturan merupakan salah satu penerapan akuntabilitas suatu organisasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Aset tetap merupakan bagian dari neraca dalam laporan keuangan yang jumlahnya signifikan dalam suatu organisasi. Sehingga, setiap satuan kerja pemerintah dituntut untuk dapat menerapkan akuntansi aset tetap yang sesuai dengan aturan, mulai dari perencanaan strategis dan operasional, perolehan, penggunaan, penyusutan, pencatatan, penilaian, pemeliharaan, penghentian dan pelepasan, sampai dengan pelaporannya di laporan keuangan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi aset tetap Balai Diklat Keuangan Medan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 7. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan (*audited*) Balai Diklat Keuangan Medan Tahun Anggaran 2011 dimana sumber datanya adalah data sekunder meliputi data perolehan aset tetap, klasifikasi aset tetap, penyusutan aset tetap, penghapusan dan pemindahtanganan aset tetap serta pelaporan aset tetap pada Balai Diklat Keuangan Medan dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah Metode Statistik Deskriptif / Studi Diskriptif

Dari penelitian yang dilakukan dapat diperoleh kesimpulan bahwa perlakuan akuntansi aset tetap pada Balai Diklat Keuangan Medan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 7.

Kata Kunci : Pemerintahan yang Baik, Akuntabilitas, Laporan Keuangan, Akuntansi Aset Tetap, Standar Akuntansi Pemerintahan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Robbil'alamin, Puji syukur yang tiada terkira selalu penulis curahkan kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas segala nikmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini untuk mencapai gelar sarjana ekonomi dari Universitas Medan Area dengan judul skripsi **“Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Balai Diklat Keuangan Medan”**. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta ummatnya yang senantiasa berpegang teguh di jalan-Nya sampai hari akhir.

Dalam proses pembuatan dan penyelesaian skripsi ini penulis memperoleh banyak pengalaman berharga serta mendapatkan begitu banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta atas segala bimbingan dan doanya yang tak terkira, yang dengan penuh kasih sayang dan kesabaran merawat, membimbing, dan membesarkan penulis hingga saat ini. Ayah dan Ibu yang telah memberikan banyak pelajaran bagi penulis, sehingga penulis semakin memahami begitu besarnya pengorbanan orang tua untuk anaknya.
2. Kakak-kakak dan adikku tercinta, Uni Dhia, Uda Adi, dan Rizki yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis. Terima kasih Ni, Da, Ki. Tidak lupa juga untuk keluarga besar Rao-rao serta keluarga besar Medan, Mama Medan, Papa Medan, Kak Wati sekeluarga, Kak Uyun Sekeluarga, dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/1/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Kak Aini sekeluarga yang telah banyak membantu dan memberikan semangat dan doa kepada penulis.

3. Bapak Prof. Dr. H.A Ya'kub Matondang, MA selaku Rektor Universitas Medan Area.
4. Bapak Prof. Dr. H.A. Sya'ad Afifuddin, SE, MEd selaku Dekan Fakultas Ekonomi Medan Area
5. Bapak Ali Usman Siregar selaku Ketua Tim Pembimbing yang telah memberikan perhatian, saran dan perbaikan terhadap skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
6. Ibu Linda Lores Purba, SE, MSi selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Medan Area yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menentukan judul skripsi ini.
7. Bapak Drs. Rasdianto, MS. Ak. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dra. Rosmaini, MMA. Ak. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan bersedia disusahkan untuk membimbing dan mengarahkan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Idris Dalimunthe selaku Sekretaris Tim Penguji Skripsi.
9. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Universitas Medan Area.
10. Bapak Marihot Tarigan, Pak Imtihan, Pak Hakrin, Bang Taufiq, Bang Jaka, Kak Yanti, Kak Ratna, Kak Phina, Bang William, Nuel, beserta seluruh pegawai pada Balai Diklat Keuangan (BDK) Medan, yang telah banyak membantu dalam mengumpulkan data dan memberi masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/1/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)31/1/24

11. Teman-teman seperjuangan di kelas ekstensi Universitas Medan Area, serta rekan-rekan alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Dodo, Adit, Rahmad, Sarji, Irwan, Galang, yang telah banyak memberikan pengalaman dan semangat yang tak terlupakan kepada penulis. Semoga persahabatan kita abadi kawan.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis tuliskan satu per satu. Walaupun demikian tak mengurangi rasa terima kasih dan hormat penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, meskipun penulis berusaha untuk menghasilkan yang terbaik, dikarenakan keterbatasan ilmu, waktu, dan tenaga yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis terbuka atas segala kritik dan saran dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembacanya dan khususnya pada perusahaan objek penulisan.

Akhir kata, penulis mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan baik itu di sengaja maupun tidak. Semoga Allah SWT memberikan balasan kepada semua pihak, atas segala kebaikannya yang telah diberikan dalam mendukung proses pembuatan karya tulis ini.

Medan, November 2013

Penulis,

Muhammad Hafizh Ridha

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
BAB II LANDASAN TEORITIS	5
A. Pengertian Aset Tetap.....	5
B. Klasifikasi Aset Tetap	6
C. Perolehan Aset Tetap.....	7
D. Penyusutan Aset Tetap	8
E. Penghentian dan Penghapusan Aset Tetap	12
F. Penyajian Aset Tetap di Laporan Keuangan	13
G. Kerangka Konseptual Penelitian	14
BAB III METODE PENELITIAN.....	16
A. Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian	16

2. Lokasi Penelitian.....	16
3. Waktu Penelitian.....	16
B. Populasi dan Sampel.....	17
1. Populasi.....	17
2. Sampel	17
C. Definisi Operasional	17
1. Akuntansi	17
2. Aset Tetap	18
3. Standar Akuntansi Pemerintahan.....	19
D. Jenis dan Sumber Data	19
E. Teknik Pengumpulan Data	20
F. Teknik Analisis Data	20
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	21
A. Gambaran Umum Balai Diklat Keuangan Medan.....	21
1. Sejarah Singkat Balai Diklat Keuangan Medan	21
2. Struktur Organisasi Balai Diklat Keuangan Medan	24
3. Pengertian dan Klasifikasi Aset Tetap.....	28
4. Perolehan Aset Tetap	32
5. Penyusutan Aset Tetap.....	34
6. Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Tetap.....	34
7. Penyajian Aset Tetap di Neraca.....	37
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	39
1. Aset Tetap	39

2. Penyusutan Aset Tetap.....	44
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....	16
Tabel 4.1 Daftar Bagan Akun Standar (BAS) Aset Tetap	32
Tabel 4.2 Neraca Tingkat Satuan Kerja per 31 Desember 2011.....	38



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Konseptual Penelitian.....	15
Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi Balai Diklat Keuangan Medan	25





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). World Bank dalam Mardiasmo (2004:18) mendefinisikan *Good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik dan administratif. Pemerintahan yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Tranparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi maksudnya mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

Salah satu pelaksanaan akuntabilitas pemerintah ialah dengan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel melalui penyusunan laporan keuangan yang baik. Laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, berhubung laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan yang

disajikan setidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan.

Laporan keuangan pemerintah pusat pada umumnya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I.01 halaman 8, terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA); Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL); Neraca; Laporan Operasional (LO); Laporan Arus Kas (LAK); Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Salah satu bagian dari laporan keuangan tersebut ialah Neraca, yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aktiva, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Salah satu komponen utama dari neraca adalah aktiva yang dalam perinciannya terdiri dari aktiva lancar, investasi, dan aktiva tetap.

Aset tetap merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Oleh karena itu, dibutuhkan perlakuan akuntansi yang baik untuk mengontrol dan mengawasinya. Akuntansi aset tetap dapat dilakukan mulai dari perencanaan strategis dan operasional, perolehan, penggunaan, penyusutan, pencatatan, penilaian, pemeliharaan, penghentian dan pelepasan, sampai dengan pelaporannya di laporan keuangan. Sehingga, aset tetap sangat besar peranannya dalam menggambarkan posisi aset yang dimiliki pemerintah.

Balai Diklat Keuangan Medan, yang beralamat di Jalan Ekawarni Nomor 30, Gedung Johor, Medan Johor, Medan, merupakan salah satu instansi vertikal Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan yang bertugas

untuk menyelenggarakan pendidikan keuangan di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Saat ini, Balai Diklat Keuangan Medan sudah menempati kantornya yang baru (sebelumnya di Gedung Keuangan Negara Medan, Jl. Diponegoro Nomor 30A). Sehingga, Aset tetap kantor ini cukup banyak dan beraneka ragam, ditambah kondisi gedung yang baru, dan hingga saat ini masih ada pembangunan beberapa gedung tambahan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membandingkan pengetahuan teoritis dengan kenyataannya di lapangan, untuk itu penulis memilih Balai Diklat Keuangan Medan sebagai tempat penelitian, kemudian hasil penelitian dituangkan dengan judul **“Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Balai Diklat Keuangan Medan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, rumusan masalah penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut: “Apakah perlakuan akuntansi aset tetap pada Balai Diklat Keuangan Medan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No. 7?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah akuntansi aset tetap pada Balai Diklat Keuangan Medan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No. 7

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain:

1. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis. khususnya mengenai praktik akuntansi aset tetap.
2. Sebagai sumber informasi bagi para pemangku kepentingan untuk dapat mengambil keputusan berkaitan pencatatan dan penerapan akuntansi aset tetap di perusahaan.
3. Sebagai referensi dalam melakukan penelitian lanjutan khususnya penelitian yang berkaitan dengan akuntansi aset tetap mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik lagi.



BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Aset Tetap

Committee on Terminology (1953:26) menyatakan, “Aktiva adalah sesuatu yang akan disajikan di saldo debit yang akan dipindahkan setelah tutup buku sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi (bukan karena saldo negatif yang akan dinilai sebagai utang), saldo debit ini merupakan hak milik atau nilai yang dibeli atau pengeluaran yang dibuat untuk mendapatkan kekayaan di masa yang akan datang.” *APB Statement* (1970:132) menyatakan “Aktiva adalah Kekayaan ekonomi perusahaan, termasuk didalamnya pembebanan yang ditunda, yang dinilai dan diakui sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.”

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (2010:7-5) menyatakan,

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap merupakan bagian yang cukup signifikan dalam aset pada neraca satuan kerja pemerintah. Definisi aktiva tetap yang diberikan oleh Carl S. Warren, James M. Reeve, Philip E. Fess (2005:492) “Aktiva tetap sebagai aktiva jangka panjang atau aktiva yang *relative permanent*, yang dapat disebut juga dengan aktiva berwujud (*tangible assets*).” Mulyadi (2002:179) menyatakan “Aktiva tetap sebagai kekayaan perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai masa manfaat

ekonomi lebih dari satu tahun dan diperoleh perusahaan bukan untuk dijual kembali.” Pendapat Muhammad Fakhri (2004:23-2) “Aktiva tetap perusahaan adalah aktiva tetap berwujud yang terletak atau berada di Indonesia, yang dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.”

B. Klasifikasi Aset Tetap

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (2010:7-8) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

2. Peralatan dan mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3. Gedung dan bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

4. Jalan, irigasi, dan jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

5. Aset tetap lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

6. Konstruksi dalam pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aktiva tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aktiva tetap dan harus disajikan di pos aktiva lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

C. Perolehan Aset Tetap

Pada saat pengakuan awal, aset tetap harus diukur sebesar biaya perolehan, yang meliputi unsur biaya:

1. Harga beli, termasuk diantaranya pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan, setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan lainnya;
2. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan;
3. Estimasi awal biaya pembongkaran aset, jika aset tersebut selama periode tertentu digunakan bukan untuk menghasilkan persediaan.

Aset tetap di dalam pemerintahan, disebut juga dengan Barang Milik Negara. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang dimaksud dengan Barang Milik Negara (BMN)/Barang Milik Daerah (BMD) meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah, maupun barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, seperti:

1. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

D. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah proses pengalokasian harga perolehan, bukan proses penilaian aset tetap. Pengalokasian harga perolehan diperlukan agar dapat dilakukan perbandingan yang tepat antara pendapatan dengan biaya. Perubahan harga aktiva tetap yang terjadi di pasar, tidak perlu dicatat dalam pembukuan perusahaan karena aktiva tetap dimiliki perusahaan untuk digunakan, bukan untuk dijual kembali. Oleh karena itu nilai buku aset (harga perolehan dikurangi akumulasi depresiasi), biasanya sangat berbeda dengan harga pasar aktiva yang bersangkutan.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan

harus dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan Diinvestasikan dalam Aset Tetap. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

Ada tiga faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan besarnya biaya depresiasi setiap periode antara lain:

1. Harga perolehan (Cost)

Yaitu uang yang dikeluarkan atau hutang yang timbul dan biaya-biaya yang terjadi dalam pemerolehan suatu aset dan menemukannya agar dapat digunakan.

2. Nilai sisa (Residu)

Nilai sisa suatu aset yang didepresiasi adalah jumlah yang diterima bila aktiva tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi, dikurangi dengan biaya-biaya yang terjadi pada saat menjual atau menukarnya.

3. Taksiran umur

Taksiran umur kegunaan aktif dipengaruhi oleh cara-cara pemeliharaan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dianut dalam reparasi. Taksiran umur ini biasanya dinyatakan dalam satuan periode waktu, satuan hasil produksi atau satuan jam kerjanya.

Menurut Soemarsono, (2005 : 25) ada dua faktor yang mempengaruhi besarnya penyusutan. Dua faktor itu adalah nilai aktiva tetap yang digunakan dalam penghitungan penyusutan (dasar penyusutan) dan taksiran manfaat. Ada beberapa cara untuk menghitung penyusutan, yaitu:

1. Metode garis lurus (*straight line method*)

Metode ini merupakan metode perhitungan yang paling sederhana dan banyak digunakan oleh organisasi perusahaan. Cara ini memberikan beban depresiasi yang konstan pada setiap periode akuntansi selama masa manfaat dari aktiva tetap yang bersangkutan. Rumus untuk menghitung depresiasi dengan metode ini yaitu:

$$\text{Depresiasi} = \frac{HP - NS}{N}$$

Keterangan :

HP = Harga Perolehan Aset

NS = Taksiran Nilai Sisa

N = Taksiran Umur Kegunaan/Ekonomis

2. Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*)

Pada metode ini, biaya depresiasi dari tahun ke tahun semakin menurun. Hal ini terjadi karena perhitungan biaya depresiasi periodik didasarkan pada nilai buku (harga perolehan dikurangi dengan akumulasi depresiasi) aset yang semakin menurun dari tahun ke tahun. Metode ini merupakan metode depresiasi yang dihitung dengan mengalihkan nilai buku aset pada awal periode dengan dua kali tarif garis lurus. Nilai buku pada awal tahun pertama adalah sama dengan harga perolehan aset, sedangkan pada tahun-tahun



berikutnya, nilai buku adalah selisih antara harga perolehan dengan akumulasi depresiasi pada awal tahun. Berbeda dengan metode lainnya, pada metode ini nilai residu tidak diperhitungkan. Akan tetapi, nilai residu akan menjadi batas jumlah depresiasi yang akan dilakukan. Depresiasi akan berakhir apabila nilai buku telah mencapai jumlah yang sama dengan atau mendekati taksiran nilai residu.

Rumus untuk menghitung depresiasi dengan metode ini yaitu:

$$\text{Depresiasi} = N \times (100\%/n \times 2)$$

Keterangan : N= nilai buku aktiva, n= taksiran umur ekonomis

3. Metode unit produksi (*unit of production method*)

Dalam metode suatu hasil, masa pemakaian aset yang dinyatakan dengan jangka waktu, melainkan dengan jumlah satuan (unit) yang dapat dihasilkan oleh aktiva yang bersangkutan. Metode ini cocok digunakan untuk depresiasi mesin pabrik, karena hasil suatu mesin dapat diukur satuannya. Metode ini dapat juga didasarkan pada jam kerja mesin atau jam kerja operator yang menangani mesin. Metode ini dapat digunakan juga untuk peralatan angkutan (diukur dengan jarak yang ditempuh) atau peralatan kantor tertentu (diukur dengan jam pemakaian). Namun demikian metode ini tidak tepat digunakan pada gedung atau mebel, karena untuk aktiva semacam ini depresiasi lebih merupakan fungsi waktu (bukan kegiatan), dan satuan hasilnya sukar untuk diukur. Oleh karena itu dalam metode ini yang perlu ditaksir adalah jumlah satuan hasil yang diperkirakan dapat dihasilkan oleh aset. Taksiran satuan hasil ini dipakai untuk membagi harga perolehan depresiasi, sehingga dapat

ditentukan depresiasi per tahun hasil. Angka depresiasi per unit hasil ini kemudian dikalikan dengan jumlah satuan hasil sesungguhnya pada satu tahun, sehingga dapat diterapkan depresiasi untuk tahun yang bersangkutan. Rumus untuk menghitung metode tersebut adalah hasilnya sebagai berikut:

$$\text{Depresiasi} = \frac{HP - NS}{N}$$

Keterangan :

HP = Harga Perolehan

NS = Nilai Sisa

N = Taksiran Jumlah Penggunaan Aktiva

E. Penghentian dan Penghapusan Aset Tetap

Suatu aktiva tetap dapat dihentikan operasinya baik secara normal ataupun secara terpaksa. Aset tetap yang dieliminasi dari neraca dapat disebabkan tidak dapat digunakan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa hal yang penting dilakukan oleh perusahaan sehubungan dengan penghentian aktiva tetap adalah:

1. Aktiva tetap dibuang saja

Dalam hal ini perkiraan aktiva tetap dan akumulasi penyusutan harus dihapuskan dengan mengkreditkan perkiraan aktiva tetap yang bersangkutan sebesar harga perolehannya dan mendebet total penyusutan sampai saat

penyingkirannya. Apabila ada nilai sisanya, maka dicatat sebagai kerugian atas pelepasan aktiva tersebut.

2. Aktiva tetap dapat dijual

Penyusutan yang terjadi selama periode antara tanggal ayat jurnal penyusutan terakhir dibuat dengan tanggal penjualan, nilai sisa aktiva tersebut jika selisih dengan harga jual dapat dihitung laba atau rugi.

3. Aktiva tetap dapat ditukar

Prosedur penukaran aktiva tetap sama dengan prosedur perolehannya yang dilakukan melalui pertukaran.

4. Dipakai di luar operasi normal perusahaan

Aktiva tetap tersebut dicatat atau digolongkan sebagai investasi. Contoh : Tanah yang dibeli yang tidak diperuntukkan untuk bangunan di atasnya.

5. Aktiva tetap di non-aktif kan

Aktiva yang tidak dipakai lagi dalam operasi perusahaan dicatat atau digolongkan sebagai aktiva lain-lainnya di neraca perusahaan dengan nilai nol yaitu harga dengan penyusutan atau dibulatkan Rp1.

Aktiva tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aktiva tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

F. Penyajian Aset Tetap di Laporan Keuangan

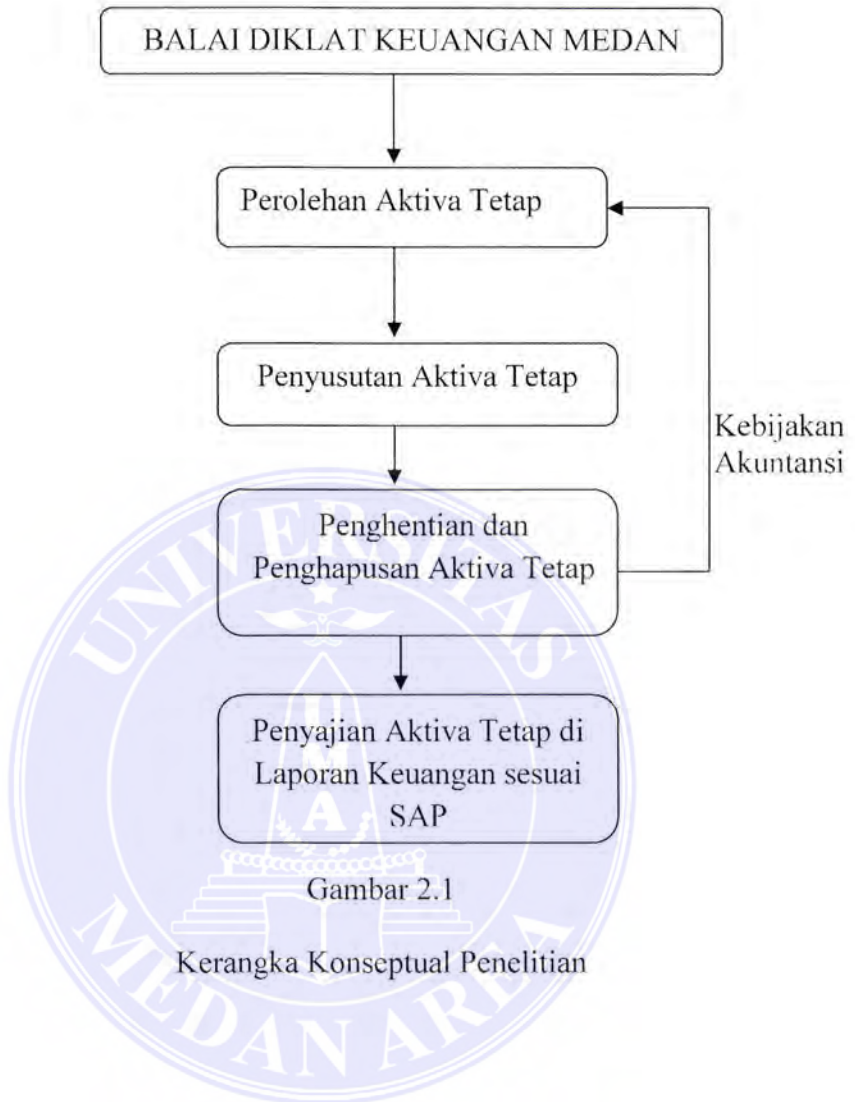
Secara umum Aset tetap perusahaan disajikan dalam laporan keuangan yaitu pada komponen neraca dan berada pada sisi aset. Sedangkan, menurut Harahap

(2002:123), bentuk penyajian aktiva tetap di dalam neraca yang umumnya sering digunakan oleh perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Dalam neraca yang hanya mencantumkan nilai buku saja atau nilai *cost* aktiva tetap masing-masing dan kemudian dikurangi akumulasi Penyusutan secara global;
2. Informasi yang lebih lanjut dapat dibuat dalam catatan atas laporan keuangan. Di sini dapat dibuat nilai *cost* masing-masing dan Akumulasi Penyusutan masing-masing;

G. Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah tentang penerapan kebijakan akuntansi aktiva tetap pada Balai Diklat Keuangan Medan yang terdiri dari perolehan, penyusutan, penghapusan dan penghentian, sampai dengan penyajian aktiva tetap di laporan keuangan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini:



Gambar 2.1

Kerangka Konseptual Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Sujana dan Ibrahim (1989:65) “penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang”. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kasus yakni untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan peraturan yang ada.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Balai Diklat Keuangan Medan, Jalan Ekawarni Nomor 30, Gedung Johor, Medan Johor, Medan, Sumatera Utara.

3. Waktu Penelitian

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No	Keterangan	Juli 2013			Agustus 2013				September 2013			
		II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Pengajuan Judul	■										
2	Konsultasi / Bimbingan			■	■	■						
3	Pembuatan dan Seminar Proposal				■	■	■					
4	Pengumpulan Data					■	■	■				
5	Analisis Data						■	■	■	■		
6	Penyusunan & Bimbingan Skripsi							■	■	■	■	
7	Pengajuan dan Sidang Meja Hijau									■	■	■

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Fathoni (2006:103) menyatakan, “populasi adalah keseluruhan unit elementer yang parameternya akan diduga melalui statistika hasil analisis yang dilakukan terhadap sampel penelitian”.

Populasi dan sampel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah laporan keuangan (*audited*) Balai Diklat Keuangan Medan Tahun Anggaran 2011.

2. Sampel

Fathoni (2006:103) menyatakan, “sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Sampel yang digunakan adalah seluruh populasi yaitu laporan keuangan (*audited*) Balai Diklat Keuangan Medan Tahun Anggaran 2011.

C. Definisi Operasional

1. Akuntansi

Akuntansi adalah cara untuk mengumpulkan data ekonomis dan melaporkan kepada macam-macam individu dan pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk menghasilkan informasi ekonomi, perusahaan perlu menciptakan suatu metode pencatatan, penggolongan, analisis dan pengendalian transaksi serta kegiatan-kegiatan keuangan kemudian melaporkan hasilnya. Informasi yang relevan untuk satu pihak mungkin menjadi tidak relevan bagi pihak lain. Akan tetapi bagi kelompok-kelompok yang membutuhkan informasi akuntansi dapat diidentifikasi, informasi yang relevan, juga dapat ditentukan. Dalam sistem pertanggungjawaban terlihat adanya arus informasi dari yang

mempertanggungjawabkan kepada yang menerima pertanggungjawaban. Akuntansi sering juga disebut *business language* karena merupakan media komunikasi.

Menurut Akbar dalam buku Akuntansi Pengantar (2004 : 1) “akuntansi adalah suatu sistem informasi yang menyajikan laporan mengenai aktivitas-aktivitas ekonomi suatu organisasi kepada para pemakai, baik perseorangan maupun kelompok”. Menurut Diana dan Lilis Setiawati dalam buku Sistem Informasi Akuntansi (2010 : 14) “akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat dan mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi (bisnis maupun nonbisnis) kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi bisnis tersebut. Pada dasarnya fokus utama dari akuntansi adalah transaksi bisnis”.

2. Aset Tetap

Aset tetap merupakan bagian yang cukup signifikan dalam aktiva pada neraca satuan kerja pemerintah. Definisi aktiva tetap yang diberikan oleh Carl S. Warren, James M. Reeve, Philip E. Fess (2005:492) “Aktiva tetap sebagai aktiva jangka panjang atau aktiva yang *relative permanent*, yang dapat disebut juga dengan aktiva berwujud (*tangible assets*).” Mulyadi (2002:179) menyatakan “aktiva tetap sebagai kekayaan perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai masa manfaat ekonomi lebih dari satu tahun dan diperoleh perusahaan bukan untuk dijual kembali.” Pendapat Muhammad Fakhri (2004:23-2) “Aktiva tetap perusahaan adalah aktiva tetap berwujud yang terletak atau berada di Indonesia, yang dimiliki

dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.”

Akuntansi aset tetap dapat dilakukan mulai dari perencanaan strategis dan operasional, perolehan, penggunaan, penyusutan, pencatatan, penilaian, pemeliharaan, penghentian dan pelepasan, sampai dengan pelaporannya di laporan keuangan. Sehingga, aktiva tetap sangat besar peranannya dalam menggambarkan posisi aset yang dimiliki pemerintah.

3. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan sebuah pernyataan standar yang diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan kecuali bila Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan lainnya mensyaratkan perlakuan akuntansi yang berbeda.

D. Jenis dan Sumber Data

Di dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan peneliti adalah:

1. Data Kualitatif merupakan serangkaian informasi yang berasal dari hasil penelitian masih berupa fakta-fakta verbal dari keterangan. Seperti sejarah Balai Diklat Keuangan Medan, struktur organisasi dan lain-lain.
2. Data Kuantitatif merupakan data berbentuk angka-angka baik secara langsung dari hasil penelitian maupun hasil pengolahan data kualitatif menjadi data kuantitatif dengan menggunakan skala interval. Seperti laporan keuangan

Balai Diklat Keuangan Medan, metode penyusutan, dan lain-lain. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh penulis melalui hasil wawancara dengan pejabat dan pelaksana Balai Diklat Keuangan Medan.
- b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa artikel, buku-buku dan dokumen yang berhubungan dengan judul skripsi penulis.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan adalah :

1. Wawancara (interview) yaitu teknik yang dilakukan berupa tanya jawab atau wawancara secara langsung kepada pengelola keuangan, khususnya aktiva tetap di Balai Diklat Keuangan Medan.
2. Dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data dan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian, yang terdapat pada Balai Diklat Keuangan Medan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah Metode Statistik Deskriptif/Studi Diskriptif. Menurut **Uma Sekaran (2009:158)** “Studi Diskriptif adalah studi/penelitian yang digunakan untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi.” Penulis akan memaparkan bagaimana kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintahan dengan pelaksanaan akuntansi aktiva tetap pada Balai Diklat Keuangan Medan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan akuntansi aset tetap yang diterapkan oleh Balai Diklat Keuangan Medan ini telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, misalnya: Pengklasifikasian aset tetap yang telah sesuai dengan kriteria-kriteria yang ada pada standar akuntansi pemerintahan. Yaitu, tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya.
2. Balai Diklat Keuangan Medan telah mencatat nilai aset tetap sesuai dengan biaya perolehannya. Termasuk, dengan menambahkan biaya-biaya yang memang harus dimasukkan dalam biaya perolehan aset tetap tersebut. Contohnya terdapat pada pengadaan AC tahun 2011 memasukkan biaya instalasi, serta pengadaan jasa konstruksi asrama, perusahaan juga mencantumkan biaya pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan biaya-biaya lain yang memang harus di tambahkan dalam biaya perolehan aset tetap.
3. Pengeluaran yang terjadi pada aset tetap sudah di kapitalisasi sesuai dengan batasan-batasan yang telah dibuat oleh perusahaan. Memang, SAP tidak memberikan batasan yang pasti atas nilai kapitalisasi pengeluaran modal atau pengeluaran pendapatan setiap entitas dikarenakan beragamnya

aktivitas entitas. Namun, dengan batasan-batasan kapitalisasi yang telah dibuat, perusahaan telah menerapkan standar akuntansi dengan baik.

4. Penyusutan aset tetap perusahaan belum dijalankan dengan baik, hal ini dikarenakan belum ada peraturan serta pedoman yang tepat dalam melakukan penyusutan aset tetap perusahaan. Walaupun, tanggal perolehan aset tetap perusahaan berbeda-beda, diharapkan dapat disusutkan sesuai dengan kondisi yang ada.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Kepada perusahaan, sebaiknya sudah mulai diterapkan penyusutan aset tetap pada tahun 2013 ini, karena sudah ada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait penyusutan Barang Milik Negara (BMN) berupa aset tetap. Penulis sudah memberikan penjelasan tentang penyusutan aset tetap pada Bab IV skripsi ini. Dengan demikian, diharapkan kondisi aset tetap perusahaan dapat tergambarkan sesuai dengan keadaan sebenarnya.
2. Kepada peneliti selanjutnya juga diharapkan melakukan penelitian dengan menggunakan data tahunan serta peraturan yang terbaru (*up to date*) sehingga hasil yang didapatkan akan semakin akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, Sofyan Syafri, **Teori Akuntansi, Edisi Revisi 2011**, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Pemerintah Republik Indonesia, **Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara**
- Pemerintah Republik Indonesia, **Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara**
- Pemerintah Republik Indonesia, **Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah**
- Pemerintah Republik Indonesia, **Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah**
- Pemerintah Republik Indonesia, **Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan**
- Pemerintah Republik Indonesia, **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2007 tentang Penatausahaan BMN**
- Pemerintah Republik Indonesia, **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar**
- Pemerintah Republik Indonesia, **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat**
- Pemerintah Republik Indonesia, **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat**
- Pemerintah Republik Indonesia, **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara**
- Pemerintah Republik Indonesia, **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat**

Pemerintah Republik Indonesia, **Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat**

Skousen, K. Fred, et. al., *Intermediate Accounting Edisi ke-16*, Penerjemah: Ali Akbar, Salemba Empat, Jakarta, 2009.

Warfield, Terry D., et. al., *Intermediate Accounting Jilid 2*, Edisi ke-12, Alih Bahasa: Emil Salim, Erlangga, Jakarta, 2007.

Warren, Carl S., et. al., **Accounting 21st Edition, Pengantar Akuntansi Edisi 21**, Penerjemah: Aria Farahmita, dkk., Salemba Empat, Jakarta, 2005.

Fathoni, Abdurrahmat, **Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi**, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.

Sugiyono, **Metode Penelitian Bisnis**, Cetakan Kelimabelas, Alfabeta, Bandung, 2010.

